

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan hidup manusia ialah tempat tinggal yang layak digunakan. Mengingat bertambahnya penduduk di Indonesia, maka jumlah lahan semakin sempit dan hal ini menyebabkan harga tanah atau property semakin meningkat serta Kenaikan pendapatan tidak selaras dengan harga rumah saat ini, Bank Syariah sebagai salah satu lembaga pembiayaan memberikan suatu layanan kepada masyarakat dengan cara menyediakan pembiayaan pemilikan rumah atau dapat disebut dengan PPR, pembayaran PPR dilakukan dengan cara mengangsur sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh hunian.

Penelitian ini mengkaji konsep denda dalam pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah dan ratio pengenaan denda pada pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kontraktual. penelitian ini mengkaji perbandingan antara konsep denda dalam PPR dan KPR. Pengaturan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan tentunya tak luput dari risiko. Salah satu risiko ialah risiko pembiayaan, risiko pembiayaan ini muncul ketika nasabah yang dengan sengaja tidak melaksanakan akad tersebut berupa tidak membayar angsuran PPR. Atas penundaan

pembayaran PPR tersebut, bank syariah memberikan denda kepada Nasabah. Menjadi kewajiban Bank Syariah untuk membukukan denda tersebut ke dalam dana sosial bukan sebagai pendapatan.

Kata kunci : Pembiayaan Pemilikan Rumah, Denda, Dana Sosial.



ABSTRACT

Humans are social beings that need assistance from other human being in fulfilling their needs. One of human needs is a proper shelter. Considering the increasing of population in Indonesia, the amount of land is getting narrower and it will leads to the increasing price of land or property. The increase in incomes is now aligned with the current property prices, Syariah Bank as one of the financial institution grant services to the society by providing home ownership financing, often called PPR. Its payments made by installments to facilitate society in obtaining a proper shelter.

This bachelor thesis review about the concept of fine in home ownership financing in syariah banking and conventional banking, the second is The aim of fine in home ownership financing in syariah banking and conventional banking. This bachelor thesis is compiled with statute approach, conceptual approach, and contractual approach. Regulation concerning the activities carried out by Syariah Bank is regulated under Law No.21 year 2008 on Syariah Banking. In providing its financing, Syariah Bank is overshadowed by risks as well. One of the risks is financing risk, its arise when a customer intentionally breach the agreement in form of did not paying PPR installments. On its delayed payments, Syariah Bank gives the customer fines, and it became the duty of Syariah Bank to record these fines into social funds instead of revenue.

Keywords: Home Ownership Financing in Syariah Banking, Fine, Social Funds.